



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah , maka Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah.

Adapun Program dan Kegiatan yang dituangkan pada Rencana Kerja BPKAD sesuai Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota mempunyai tugas pokok membantu walikota melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Proses penyusunan Renja BPKAD mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) , Rancangan Strategis (Renstra) hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta permasalahan yang dihadapi. Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah perlu



ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyesuaian program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra BPKAD dan RPJMD tahun yang bersangkutan

Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 98 Tahun 2018 tentang sistem informasi pembangunan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;



13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2020
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Blitar;
17. Peraturan Daerah kota Blitar Noor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005 – 2025 ;
18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Blitar 2016-2021;
21. Peraturan Walikota Blitar No. 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
22. Peraturan Walikota Nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
23. Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2017 tentang RKPD 2018;
24. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Perwali Nomor 81 Tahun 2016 tentang penetapan Renstra OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
25. SK Walikota Blitar Nomor 188/ /HK/410.010.2/2017 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2019.



### 1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2021 **dimaksudkan** untuk memberikan arahan rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sedangkan **tujuan** penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar adalah sebagai berikut:

1. Menjadi acuan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Blitar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Blitar;
2. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran 2021;
3. Merumuskan program dan kegiatan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar yang terarah dan tepat sasaran selama tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok fungsinya;
4. Menyajikan capaian kinerja pelayanan tahun lalu;
5. Menyajikan isu strategis, tujuan dan sasaran perangkat daerah.

### 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

(Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan )

#### **BAB II : EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

(Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat



Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat)

**BAB III : TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH**

(Telaah Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan)

**BAB IV : RENCANA PROGRAM ,KEGIATAN, INDIKATOR ,LOKASI KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB V : PENUTUP**



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD merupakan kegiatan yang bersifat reguler dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan serta merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) tahun berjalan.

Hasil Evaluasi Renja tahun 2020 dapat kami uraikan beberapa kegiatan yang belum optimal dalam pencaian target kinerja maupun realisasinya adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi terserap 71, 22 % hal ini dikarenakan pandemi Covic kegiatan rapat dilaksanakan wibinar .
2. Kegiatan penyusunan laporan keuangan terserap 87,47% hal ini karena adanya honor yang tidak terserap dan efisiensi anggaran
3. Kegiatan Pengelolaan publikasi dan informasi perangkat daerah terserap 80,00% hal ini dikarenakan tidak adanya kegiatan yang mengundang banyak orang .
4. Kegiatan identifikasi penagihan pajak daerah terserap 87,46% hal ini



dikarenakan kegiatan rapat yang mengundang banyak orang tidak dilaksanakan karena pandemi Covid

5. Kegiatan Pembinaan dan penyelesaian keberatan pajak daerah terserap 86,06 % hal ini karena jasa publikasi dibantu oleh pihak ketiga atau rekan kerja tempat pembayaran pajak .
6. Kegiatan penilaian dan penetapan pajak daerah , terealisasi 74,15% karena pelaksanaan sosialisasi dan monitoring pendapatan daerah dijadikan satu dengan kegiatan pengundian dan rekonsiliasi pendapatan (efisiensi anggaran).
7. Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapat , terealisasi 85,51% karena kegiatan bintek bagi petugas pajak tidak terserap , efisiensi anggaran
8. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD , terealisasi 72,12% dikarenakan dengan penyesuaian SIPAPBD terhadap PP 12 Tahun 2019 belum ada peraturan teknis yang menjadi pedoman (efisiensi anggaran).
9. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD teresalisasi 88,13 % pengurangan belanja cetak dan penggandaan serta pemeliharaan perangkat lunak dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

Atas tidak tercapainya kegiatan Renja Tahun 2020 tersebut maka BPKAD akan lebih cermat lagi, dan selalu melakukan Monitoring dan Evaluasi kepada masing-masing Bidang teknis untuk mendorong merealisasikan target kinerja sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan dan lebih teliti dalam penyusunan Rencana Aksi Kegiatan BPKAD Tahun selanjutnya.

Adapun kegiatan yang memiliki fungsi keuangan yang meliputi tertib pengelolaan perencanaan, penatausahaan, akuntansi dan aset telah memenuhi target realisasi dan kinerja karena bersifat rutin setiap tahun dan memang harus





terselesaikan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dan Realisasi Renstra BPKAD dapat digambarkan sebagai berikut :

## Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Tahun



**Tabel 2.1**

### Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2020 Kota Blitar

Nama SKPD : Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)                                    | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016 - 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan     |  |
|------|---|---|---|---|--|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
|      |   |   |   |   | Target Renja SKPD Tahun 2019                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2019 | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Trib I (%)) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    | 2   | 3   | 4   | 5   | 6  | 7                               | 8=7/6                 | 9   | 10=5+7+9   | 11=10/4                                      |
| I    | PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN                                 | Persentase Terpenuhi kebutuhan penyelenggaraan Administrasi perkantoran                   | 100%  | 100%  | 100%   | 100%                            | 88,31%                | 100%  | 288,31%  | 2,88   |
|      | Penyediaan Administrasi Perkantoran                           | Jumlah jenis Alat Tulis kantor yang terpenuhi   | 54 jenis  | 38 jenis  | 38 jenis   | 38 jenis                        | 100%                  | 38 macam  | 130 macam  | 2,41   |
|      |   | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan   | 34 jenis  | 34 jenis  | 12 jenis   | 34 jenis                        | 100%                  | 12 cetakan  | 80 macam   | 2,35   |
|      |   | Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia   | 60 jenis  | 30 jenis  | 45 macam   | 30 macam                        | 100%                  | 45 macam  | 135 macam  | 2,25   |
|      |   | Jumlah jenis bahan bacaan dan puneraturan perundang-dangan yang tersedia dalam satu tahun | 3 jenis   | 3 jenis   | 2 bahan bacaan   | 2 bahan bacaan                  | 100%                  | 2 bahan bacaan                                      | 1805 bahan bacaan  | 601,67                                       |
|      |   | Jumlah paket makan dan minum yang tersedia  | 2 paket   | 750 porsi   | 257 porsi  | 257 porsi                       | 100%                  | 257 porsi   | 1009 porsi   | 504,5  |
|      | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar          | Jumlah terlaksananya urusan kedinasan terkait   | 175 kali  | 100 rakor   | 108 rakor  | 1008rakor                       | 100%                  | 108 rakor   | 304 rakor  | 1,74   |

## Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Tahun



| Kode | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan<br>Program/Kegiatan                | Indikator Kinerja<br>Program<br>(outcomes)/Kegiatan<br>(Output)                                     | Target Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra SKPD)<br>Tahun 2016 -<br>2021 | Realisasi<br>Target Kinerja<br>Hasil Program<br>dan Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan<br>Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                    |                             | Target Program<br>dan Kegiatan<br>(Renja SKPD<br>Tahun 2020) | Perkiraan Realisasi Capaian Target<br>Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan                 |  |
|------|--|---|--|--|---|------------------------------------|-----------------------------|--|---|--|
|      |  |   |  |  | Target<br>Renja<br>SKPD<br>Tahun<br>2019                              | Realisasi Renja<br>SKPD Tahun 2019 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |  | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>Tahun<br>Berjalan (Tahun 2020) | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra (%) |
| 1    | 2  | 3   | 4  | 5  | 6   | 7                                  | 8=7/6                       | 9  | 10=5+7+9  | 11=10/4  |
|      | daerah   | dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah  |  |  |   |                                    |                             |  |   |  |
|      | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan  | Jumlah pejabat pengelola keuangan dan pengelola barang daerah yang menerima honorarium              | 750 orang  | 750 orang  | 750 orang   | 750 orang                          | 100%                        | 0  | 1500 orang  | 2,00   |
|      | Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Dana Pelaporan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Jumlah rekening jasa komunikasi dan listrik yang terbayar   | 5 rekening   | 3 rekening   | 3 rekening  | 3 rekening                         | 100%                        | 5 rekening   | 13 rekening   | 2,6  |
|      |  | Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan  | 20 unit  | 43 unit  | 43 unit   | 43 unit                            | 100%                        | 44 unit  | 53 unit   | 2,65   |
|      |  | Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor yang terpenuhi                  | 40 jenis   | 27 komponen  | 27 komponen   | 27 komponen                        | 100%                        | 27 komponen  | 97 unit   | 2,43   |
|      |  | Jumlah jenis perlengkapan kantor yang terpenuhi   | 4 jenis  | 0  | 0   | 0                                  | 0                           | 0  | 0   | 0  |
|      |  | Jumlah jenis peralatan kantor yang terpenuhi dalam satu tahun                                       | 6 jenis  | 8 macam  | 8 macam   | 8 macam                            | 100%                        | 5 macam  | 19 macam  | 3,17   |
|      |  | Jumlah jenis kendaraan Dinas/Operasional yang terawat (penggantian suku cadang) dan mendapatkan BBM | 3 jenis  | 3 unit   | 3 unit  | 3 unit                             | 100%                        | 3 unit   | 9 unit  | 3,00   |

## Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Tahun



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)                                    | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016 - 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan                |  |
|------|---|---|---|---|--|---------------------------------|-----------------------|---|---|--|
|      |   |   |   |   | Target Renja SKPD Tahun 2019                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2019 | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Trib I tahun 2020) (%) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    | 2   | 3   | 4   | 5   | 6  | 7                               | 8=7/6                 | 9   | 10=5+7+9  | 11=10/4                                      |
|      |   | secara teratur  |   |   |  |                                 |                       |   |   |  |
|      |   | Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi                                    | 3 unit  | 4 unit  | 4 unit   | 4 macam                         | 100%                  | 5 macam   | 12 unit   | 4  |
| dok  |   | Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi                                       | 2 jenis   | 8 jenis   | 8 macam  | 8 macam                         | 100%                  | 6 macam   | 16 unit   | 8  |
|      |   | Jumlah gedung kantor yang terpelihara   | 0   | 0   | 0  | 0                               | 0                     | 2 unit  | 0   | 0  |
|      |   | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara  | 0   | 0   | 0  | 0                               | 0                     | 2 macam   | 0   | 0  |
|      |   | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara   | 0   | 0   | 0  | 0                               | 0                     | 5 macam   | 5   | 0  |
|      | Penyusunan Laporan Keuangan                                   | Jumlah dokumen pertimbangan kerugian daerah   | 7 dok   | 7 dok   | 5 dok  | 7 dok                           | 100%                  | 2 dok   | 16 dok  | 2,29   |
|      |   | Jumlah penerima bantuan keuangan, hibah dan bansos yang sesuai dengan aturan yang berlaku | 258 penerima  | 0   | 0  | 0                               | 0                     | 0   | 258 penerima  | 1  |
|      |   | Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun                                       | 0   | 0   | 5 dok  | 5 dok                           | 0                     | 5 dokumen   | 5 dokumen   | 0  |
|      |   | Jumlah sosialisasi /rapat koordinasi hibah dan bansos                                     | 0   | 0   | 120 org  | 120 orang                       | 0                     | 120 orang   | 120 orang   | 0  |
|      | Penyusunan dan Pelaporan                                      | Jumlah jenis dokumen  | 8 dok   | 6 dok   | 6 dok  | 6 dok                           | 100%                  | 10 dok  | 21 dok  | 2,63   |

## Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Tahun



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)                                 | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016 - 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan    |  |
|------|---|--|---|---|--|---------------------------------|-----------------------|---|---|--|
|      |   |  |   |   | Target Renja SKPD Tahun 2019                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2019 | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Trib I (%) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  | 7                               | 8=7/6                 | 9   | 10=5+7+9  | 11=10/4                                      |
|      | Ketatalaksanaan Perangkat Daerah  | laporan keuangan yang tersusun (SAKIP, PK, IKU)  |   |   |  |                                 |                       |   |   |  |
| 3    | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b> | <b>Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun</b>                      | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   | <b>100%</b>  | <b>100%</b>                     | <b>100%</b>           | <b>100%</b>   | <b>300%</b>   | <b>3,00</b>                                  |
|      | Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah                     | Jumlah jenis dokumen (Renstra, Renja, IKU/IKI, PK, RKA, DPA dan DPPA) yang tersusun    | 6 dok   | 7 dok   | 6 dok  | 6 dok                           | 100%                  | 6 dok   | 18 dok  | 3,00   |
| 4    | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH</b>                                 | <b>Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah</b>                        | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   | <b>100%</b>  | <b>100%</b>                     | <b>100%</b>           | <b>100%</b>   | <b>300%</b>   | <b>3,00</b>                                  |
|      | Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional                    | Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti                                | 5 event   | 5 event   | 5 event  | 5 event                         | 100%                  | 5 event   | 15 dok  | 3,00   |
|      | Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD  | Jumlah penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD                                  | 3 kali  | 2 kali  | 2 kali   | 2 kali                          | 100%                  | 2 publikasi   | 7 publikasi   | 2,33   |
|      | Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian                                  | Jumlah pejabat pengelola keuangan dan pengelola barang daerah yang menerima honorarium | 750 orang   | 750 orang   | 750 orang  | 750 orang                       | 100%                  | 750 orang   | 2250 orang  | 3,00   |
|      |   | Jumlah ASN yang mengikuti bimtek peningkatan kapasitas pengelola keuangan              | 68 orang  | 68 orang  | 68 orang   | 68 orang                        | 100%                  | 68 orang  | 204 orang   | 3,00   |

## Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Tahun



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)                     | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016 - 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan                |  |
|------|---|--|---|---|--|---------------------------------|-----------------------|---|---|--|
|      |   |  |   |   | Target Renja SKPD Tahun 2019                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2019 | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Trib I tahun 2020) (%) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  | 7                               | 8=7/6                 | 9   | 10=5+7+9  | 11=10/4                                      |
| 5    | <b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH</b> | <b>Pesentase Peningkatan tertib Penatausahaan zKeuangan Daerah</b>         | <b>95%</b>  | <b>90 %</b>   | <b>90,00%</b>  | <b>74,07%</b>                   | <b>74,07%</b>         | <b>92%</b>  | <b>240,14%</b>  | <b>80,05</b>                                 |
|      | Pelaksanaan Verifikasi dan Rekonsiliasi Penatausahaan Keuangan Daerah                 | Jumlah Dokumen SPP/SPM Yang Diverifikasi                                   | 15000 SPM   | 15000 dok   | 15.000 dok   | 15.000 dok                      | 100%                  | 15000 SPM   | 30.000 spm  | 2,00   |
|      |   | Jumlah Peserta yang Melaksanakan Rekonsiliasi belanja dan Pendapatan OPD   | 360 peserta   | 360 peserta   | 360 peserta  | 360 peserta                     | 100%                  | 360 peserta   | 720 peserta   | 2,00   |
|      |   | Jumlah Dokumen penggajian PNSD pemerintah daerah Kota Blitar dalam setahun | 1140 dokumen  | 1140 dok  | 1140 dokumen   | 1140 dokumen                    | 100%                  | 1140 dokumen  | 2280 dokumen  | 2,00   |
|      | Peningkatan Pengelolaan kas dan investasi daerah                                      | Jumlah dokumen pengelolaan kas yang dievaluasi                             | 584 dokumen   | 584 dok   | 584 dokumen  | 584 dokumen                     | 100%                  | 584 dokumen   | 1168 dokumen  | 2,00   |
|      |   | Jumlah investasi daerah yang dimonitoring dalam setahun                    | 32 dokumen  | 32 dok  | 32 dokumen   | 32 dokumen                      | 100%                  | 32 dokumen  | 64 dokumen  | 2,00   |
|      |   | Jumlah paket aplikasi SIPKD yang terpelihara                               | 1 aplikasi  | 1 paket   | 1 paket  | 1 paket                         | 100%                  | 1 paket   | 3 paket   | 3,00   |
| 6    | <b>PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN</b>          | <b>Persentase Peningkatan target Pajak Daerah</b>                          | <b>48%</b>  | <b>19,75%</b>   | <b>30 %</b>  | <b>21%</b>                      | <b>111,44%</b>        | <b>30,00%</b>                                       | <b>730,01%</b>  | <b>24,34</b>                                 |

## Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Tahun



| Kode     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                 | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)                                      | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016 - 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan                |  |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|-----------------------|---|---|--|
|          |   |   |   |   | Target Renja SKPD Tahun 2019                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2019 | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Trib I tahun 2020) (%) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1        | 2   | 3   | 4   | 5   | 6  | 7                               | 8=7/6                 | 9   | 10=5+7+9  | 11=10/4                                      |
|          | <b>DAERAH</b>   |   |   |   |  |                                 |                       |   |   |  |
|          | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Aplikasi, Informasi dan Data Pajak Daerah | Jumlah paket sistem aplikasi pengelolaan sarana dan prasarana pajak daerah yang terpelihara | 2 aplikasi  | 2 Aplikasi  | 4 Aplikasi   | 2 Aplikasi                      | 100%                  | 3 aplikasi  | 7 aplikasi  | 3,5  |
|          |   | Jumlah Data PBB-P2 yang dimutakhirkan   | 0   | 0   | 50 data  | 50 data                         | 0                     | 50 data   | 0   | 0  |
|          |   | Jumlah Media media publikasi himbauan pajak daerah BPKAD                                    | 0   | 0   | 2 media  | 2 media                         | 0                     | 2 media   | 0   | 0  |
|          | Pendaftaran dan Pendataan pajak daerah  | Jumlah wajib pajak daerah yang didata   | 47.950 WP   | 47950 WP  | 47.950 WP  | 47.950 WP                       | 100%                  | 47.950 WP   | 147.200 WP  | 3,06   |
|          | Penilaian dan Penetapan Pajak   | Jumlah dokumen penetapan pajak  | 47.950 WP   | 47950 WP  | 47.950 WP  | 47.950 WP                       | 100%                  | 47.950 WP   | 147.200 WP  | 3,06   |
|          |   | Jumlah jenis pajak yang diperiksa   | 8 jenis   | 6 Kali  | 8 jenis  | 8 jenis                         | 100%                  | 8 jenis   | 16 jenis  | 2,00   |
|          |   | Jumlah Peserta Sosialisasi Pajak daerah   | 0   | 0   | 100 orang  | 100 orang                       | 0                     | 100 orang   | 0   | 0  |
| <b>7</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>                                  | <b>Persentase peningkatan Realisasi Pajak Daerah</b>  | <b>48%</b>  | <b>19,75 1%</b>   | <b>19,75%</b>  | <b>30 %</b>                     | <b>111,44%</b>        | <b>30,00%</b>                                       | <b>73,01</b>  | <b>24,34</b>                                 |
|          | Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah  | Jumlah wajib pajak yang menyelesaikan kewajiban   | 49.095 WP   | 49095 WP  | 49.095 WP  | 49.095 WP                       | 100%                  | 49.095 WP   | 146.322 WP  | 2,98   |
|          |   | Jumlah jenis piutang daerah dari sektor pajak   | 5 pajak   | 5 pajak   | 5 pajak  | 5 pajak                         | 100%                  | 5 pajak   | 15 pajak  | 3,00   |
|          | Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah              | Jumlah dokumen laporan realisasi PAD yang tersusun  | 12 dok  | 12 dok  | 12 dok   | 12 dok                          | 100%                  | 0   | 24 dok  | 2,00   |

## Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Tahun



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan           | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)             | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016 - 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan     |  |
|------|---|--|---|---|--|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
|      |   |  |   |   | Target Renja SKPD Tahun 2019                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2019 | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Trib I (%)) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  | 7                               | 8=7/6                 | 9   | 10=5+7+9   | 11=10/4                                      |
|      |   | Jumlah peserta / OPD pelaksanaan yang dievaluasi pendapatan daerah | 40 OPD  | 40 OPD  | 40 OPD   | 40 OPD                          | 100%                  | 0   | 40 OPD   | 1,00   |
|      |   | Jumlah rancangan dokumen regulasi pendapatan asli daerah           | 1 dok   | 1 dok   | 1 dok  | 1 dok                           | 100%                  | 1 dok   | 3 dok  | 3,00   |
|      |   | Jumlah dokumen potensi sumber –sumber pendapatan daerah            | 0   | 0   | 3 dok  | 3 dok                           | 0                     | 3 dokumen   | 3 dokumen  | 0  |
|      |   | Jumlah peserta rapat koordinasi dan evaluasi PAD                   | 0   | 0   | 72 orang   | 72 orang                        | 0                     | 72 orang  | 72 orang   | 0  |
|      | Pembinaan dan penyelesaian keberatan pajak daerah                       | Jumlah dokumen keberatan wajib pajak daerah                        | 215 WP  | 215 WP  | 215 dok  | 215 dok                         | 100%                  | 215 WP  | 615 WP   | 2,86   |
|      |   | Jumlah sosialisasi publikasi pajak daerah ke masyarakat            | 100 orang   | 100 orang   | 100 orang  | 100 orang                       | 100%                  | 100 orang   | 100 orang  | 1,00   |
|      |   | Jumlah Media Publikasi Pajak Daerah                                |   |   | 2 media  | 2 media                         |                       | 2 paket   | 2 paket  | 0  |
| 8    | <b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>     | <b>Persentase penyajian data keuangan dan aset daerah</b>          | <b>95%</b>  | <b>93 %</b>   | <b>94 %</b>  | <b>95,00%</b>                   | <b>103,94%</b>        | <b>94,00%</b>                                       | <b>283,66%</b>   | <b>2,99</b>                                  |
|      | Perencanaan Kebutuhan, Standarisasi dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen daftar kebutuhan barang daerah yang tersusun        | 4 dok   | 4 dok   | 4 dok  | 4 dok                           | 100%                  | 4 dok   | 16 dok   | 4,00   |
|      |   | Jumlah dokumen standarisasi harga barang dan jasa yang             | 2 dok   | 2 dok   | 2 dok  | 2 dok                           | 100%                  | 2 dok   | 6 dok  | 3,00   |



## Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Tahun



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016 - 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan                |  |
|------|--|---|---|---|--|---------------------------------|-----------------------|---|---|--|
|      |  |   |   |   | Target Renja SKPD Tahun 2019                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2019 | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Trib I tahun 2020) (%) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    | 2  | 3   | 4   | 5   | 6  | 7                               | 8=7/6                 | 9   | 10=5+7+9  | 11=10/4                                      |
|      |  | tersusun  |   |   |  |                                 |                       |   |   |  |
|      |  | Jumlah aset daerah yang terfasilitasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah | 2 BMD   | 0   | 2 BMD  | 2 BMD                           | 100%                  | 2 BMD   | 4 BMD   | 2,00   |
|      | Peningkatan manajemen Aset barang daerah   | Jumlah peserta yang melaksanakan kegiatan rekonsiliasi aset dalam satu tahun                    | 284 orang   | 284 orang   | 284 orang  | 284 orang                       | 100%                  | 284 orang   | 568 orang   | 2,00   |
|      |  | Jumlah SDM pengelola barang yang mengikuti pengembangan kapasitas                               | 80 orang  | 80 orang  | 80 orang   | 80 orang                        | 100%                  | 80 orang  | 240 orang   | 3,00   |
| 9    | <b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERENCANAAN KEUANGAN DAERAH</b>                      | <b>Persentase Peningkatan Tertib Perencanaan Keuangan Daerah</b>                                | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   | <b>100%</b>  | <b>100%</b>                     | <b>100%</b>           | <b>100%</b>   | <b>300%</b>   | <b>3,00</b>                                  |
|      | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD | Jumlah dok.rancangan Perda tentang APBD dan rancangan perwali tentang penjabaran APBD           | 1 dok   | 1 dok   | 2 dok  | 2 dok                           | 100%                  | 0   | 2 dok   | 2,00   |
|      |  | Jumlah Dok.rancangan Perwali tentang penjabaran APBD  | 1 dok   | 1 dok   | 2 dok  | 2 dok                           | 100%                  | 0   | 2 dok   | 2,00   |
|      |  | Jumlah dokumen rancangan perda tentang APBD dan rancangan perwali tentang Penjabaran APBD       | 0   | 0   | 2 dok  | 2 dok                           | 0                     | 2 dok   | 2 dok   | 0  |

## Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Tahun



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016 - 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan     |  |
|------|--|---|---|---|--|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
|      |  |   |   |   | Target Renja SKPD Tahun 2019                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2019 | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Trib I (%)) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    | 2  | 3   | 4   | 5   | 6  | 7                               | 8=7/6                 | 9   | 10=5+7+9   | 11=10/4                                      |
|      |  | Jumlah peserta Bimtek/Sosialisasi Penyusunan APBD   | 0   | 0   | 90 orang   | 90 orang                        | 0                     | 90 orang  | 90 orang   | 0  |
|      |  | Jumlah Aplikasi APBD  | 0   | 0   | 1 aplikasi   | 1 aplikasi                      | 0                     | 1 aplikasi  | 1 aplikasi   | 0  |
|      | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan KDH tentang Perubahan Penjabaran APBD | Jumlah dokumen rancangan perda tentang Perubahan APBD   | 1 dok   | 1 dok   | 1 dok  | 1 dok                           | 100%                  | 0   | 2 dok  | 2,00   |
|      |  | Jumlah Dokumen rancangan Perwali tentang penjabaran perubahan APBD  | 1 dok   | 1 dok   | 1 dok  | 1 dok                           | 100%                  | 0   | 2 dok  | 2,00   |
|      |  | jumlah dokumen rancangan perda tentang Perubahan APBD dan dokumen rancangan perwali tentang Penjabaran Perubahan APBD | 0   | 0   | 2 dok  | 2 dok                           | 0                     | 2 dok   | 2 dok  | 0  |
|      | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD   | Jumlah Dokumen Pengendalian anggaran yang tersusun  | 4 dok   | 4 dok   | 4 dok  | 4 dok                           | 100%                  | 4 dok   | 10 dok   | 2,5  |
|      |  | Jumlah aplikasi SIPAPBD   | 1 aplikasi  | 1 aplikasi  | 1 aplikasi   | 1 aplikasi                      | 100%                  | 1 aplikasi  | 3 aplikasi   | 3,00   |
|      |  | Jumlah aplikasi SIPEK   | 0   | 0   | 1 aplikasi   | 1 aplikasi                      | 0                     | 1 aplikasi  | 1 aplikasi   | 0  |
|      | Pendampingan Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah   | Jumlah Dokumen rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota  | 4 dok   | 4 dok   | 4 dok  | 4 dok                           | 100%                  | 4 dok   | 12 dok   | 3,00   |

## Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Tahun



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan             | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)                          | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016 - 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan    |  |
|------|---|---|---|---|--|---------------------------------|-----------------------|---|---|--|
|      |   |   |   |   | Target Renja SKPD Tahun 2019                                       | Realisasi Renja SKPD Tahun 2019 | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Trib I (%) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    | 2   | 3   | 4   | 5   | 6  | 7                               | 8=7/6                 | 9   | 10=5+7+9  | 11=10/4                                      |
|      | Penyusunan Analisis Standar Belanja                                       | Jumlah dok.penyusunan analisa standar belanja                                   | 1 dok   | 1 dok   | 1 dok  | 1 dok                           | 100%                  | 1 dok   | 3 dok   | 3,00   |
| 10   | <b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AKUNTANSI DAERAH</b>  | <b>Persentase Perangkat Daerah yang tertib laporan keuangan daerah</b>          | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   | <b>100%</b>  | <b>100%</b>                     | <b>100%</b>           | <b>100%</b>   | <b>300%</b>   | <b>3,00</b>                                  |
|      | Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah peserta yang melaksanakan rekonsiliasi laporan per tribulan keuangan OPD | 450 orang   | 450 orang   | 450 orang  | 450 orang                       | 100%                  | 450 orang   | 900 orang   | 2,00   |
|      |   | Jumlah OPD yang melakukan jurnal akuntansi penatausahaan keuangan daerah        | 73 OPD  | 73 OPD  | 73 OPD   | 73 OPD                          | 100%                  | 73 OPD  | 219 OPD   | 3,00   |
|      |   | Jumlah dokumen laporan semesteran dan prognosis yang tersusun                   | 1 dok   | 1 dok   | 1 dok  | 1 dok                           | 100%                  | 1 dok   | 3 dok   | 3,00   |
|      | Penyusunan kebijakan Akuntansi pemerintah daerah                          | Jumlah dok. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang tersusun      | 1 dok   | 1 dok   | 1 dok  | 1 dok                           | 100%                  | 1 dok   | 3 dok   | 3,00   |
|      |   | Jumlah peserta Sinkronisasi Kebijakan Akuntansi                                 | 0   | 0   | 100 orang  | 100 orang                       | 0                     | 100 orang   | 100 orang   | 0  |
|      | Pengembangan sistem aplikasi Akuntansi Keuangan Daerah                    | Jumlah paket aplikasi akuntansi yang terpelihara                                | 1 aplikasi  | 1 aplikasi  | 1 aplikasi   | 1 aplikasi                      | 100%                  | 1 aplikasi  | 3 aplikasi  | 3,00   |

## Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Tahun



| Kode | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan<br>Program/Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program<br>(outcomes)/Kegiatan<br>(Output)   | Target Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra SKPD)<br>Tahun 2016 -<br>2021 | Realisasi<br>Target Kinerja<br>Hasil Program<br>dan Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan<br>Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                    |                             | Target Program<br>dan Kegiatan<br>(Renja SKPD<br>Tahun 2020) | Perkiraan Realisasi Capaian Target<br>Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan                 |  |
|------|---|---|--|--|---|------------------------------------|-----------------------------|--|---|--|
|      |   |   |  |  | Target<br>Renja<br>SKPD<br>Tahun<br>2019                              | Realisasi Renja<br>SKPD Tahun 2019 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |  | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>Tahun<br>Berjalan (Tahun 2020) | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra (%) |
| 1    | 2   | 3   | 4  | 5  | 6   | 7                                  | 8=7/6                       | 9  | 10=5+7+9  | 11=10/4  |
|      |   | Jumlah SDM akuntansi yang mengikuti sosialisasi/Bimtek/Pengembangan kapasitas   | 100 orang  | 140 orang  | 100 orang   | 100 orang                          | 100%                        | 100 orang  | 380 orang   | 3,80   |
|      | Penyusunan<br>Pertanggungjawaban<br>pelaksanaan APBD                | Jumlah dok.rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD  | 1 dok  | 1 dok  | 1 dok   | 1 dok                              | 100%                        | 0  | 2 dok   | 2,00   |
|      |   | Jumlah dok. Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD   | 1 dok  | 1 dok  | 1 dok   | 1 dok                              | 100%                        | 0  | 2 dok   | 2,00   |
|      |   | Jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan dokumen rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | 0  | 0  | 2 dok   | 2 dok                              | 0                           | 2 dok  | 2 dok   | 0  |



## **2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Kota Blitar, dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT, dapat diuraikan sebagai berikut:

### **2.2.1. Strength (Kekuatan),**

1. Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, dimana BPKAD meliputi bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah sehingga menjadi lebih kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
2. Adanya dukungan OPD terhadap upaya peningkatan Pajak Daerah dan Pengelolaan PAD;
3. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah Kota Blitar, melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang APBD/Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar serta Rancangan Peraturan KDH tentang Pejabaran APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Blitar;
4. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
5. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai dengan ditunjang latar belakang pengalaman dan pendidikan yang cukup;
6. Memiliki sarana, prasarana dan sistem informasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD.



### **2.2.2. Weaknes (kelemahan),**

1. Diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi;
2. Belum optimalnya penggalian data sumber-sumber potensi Pendapatan Daerah;
3. Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak belum optimal;
4. Adanya lembaga/instansi yang masih memiliki keinginan (egosektoral) untuk menjadi arus utama dalam suatu program dan kegiatan tanpa memperhatikan sektor-sektor yang ada;
5. Masih adanya beberapa pegawai yang kurang memiliki kepedulian, memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi BPKAD serta masih kurangnya disiplin kerja;
6. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/ informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi;
7. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi serta terbatasnya kesempatan pegawai untuk meningkatkan keahlian, kemampuan dan wawasan, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

### **2.2.3. Opportunity (peluang),**

1. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun rancangan APBD/rancangan Perubahan APBD, mengesahkan DPA-SKPD, menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan melakukan pembayaran



berdasarkan permintaan pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah. Untuk itu, BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka fasilitasi SKPD melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah;

2. Sesuai Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 305 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa untuk menunjang kelancaran, konsistensi dan sinkronisasi penyusunan APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Blitar serta kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan yang lebih tinggi, masing-masing Raperda Kota Blitar disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi;
3. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dimana BPKAD selaku koordinator PAD terutama Pajak Daerah memiliki kewenangan dalam penetapan pajak dan melakukan monitoring dan evaluasi dan pengelolaan PAD pada Unit Kerja Penghasil.
4. Sebagai Fungsi Koordinator Pengelola Barang Milik Daerah BPKAD memegang peranan penting dalam berkoordinasi dengan OPD mulai dari perencanaan kebutuhan barang, pemanfaatan barang sampai pada inventarisir barang daerah.
5. Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, maka BPKAD Kota Blitar diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Blitar terkait dengan perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.



#### **2.2.4. Treath (ancaman),**

1. Banyaknya PNS yang memasuki Masa Purna Pensiun (MPP). Oleh karena itu, untuk kedepan diperlukan adanya tambahan PNS baru yang memiliki dedikasi, loyalitas, kualitas dan kompetensi yang tinggi sesuai latar belakang pendidikannya dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi BPKAD;
2. Semangat yang berlebihan (euphoria) terhadap pelaksanaan reformasi dan otonomi daerah, yang seringkali menimbulkan pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku antara Eksekutif dan Legislatif, namun kurang memperhatikan dan mempertimbangkan dinamika yang berkembang;
3. Dengan telah diraihnya Opini WTP 10 kali berturut-turut oleh BPK atas LKD Kota Blitar mengharuskan BPKAD beserta OPD lebih cermat dan teliti dalam penyusunan Laporan Keuangan berbasis Akrua. Akan tetapi hal ini tidak diimbangi dengan jumlah SDM Pengelolaan Akuntansi di BPKAD dan SDM di masing-masing OPD yang berkompeten dalam hal penyusunan Laporan Keuangan (Tim Akuntansi).
4. Kurang tertibnya dan lengkapnya data yang disampaikan oleh OPD terkait Inventarisasi Barang yang ada, yang memungkinkan hilangnya beberapa aset peralatan dan mesin karena sulitnya menemukan informasi tahun perolehan, jenis barangnya dan harga perolehannya.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) tahun 2019. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

Penjelasan tersebut dapat diuraikan pada Tabel 2.2 sebagai berikut :



## Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Tahun



**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kota Blitar**

| NO | Indikator  | SPM/<br>Stand<br>art<br>Nasio<br>nal | IKK | Target RenstraSKPD |               |               |               | Realisasi Capaian |               | Proyeksi      |               | Catatan Analisis   |
|----|--|--------------------------------------|-----|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--|
|    |  |                                      |     | Tahun<br>2017      | Tahun<br>2018 | Tahun<br>2019 | Tahun<br>2020 | Tahun<br>2018     | Tahun<br>2019 | Tahun<br>2020 | Tahun<br>2021 |  |
|    |  |                                      |     | (thn n-2)          | (thn n-1)     | (thn n)       | (thn n+1)     | (thnn-2)          | (%)           | (thnn)        | (thnn+1)      |  |
| 1  | 2  | 3                                    | 4   | 5                  | 6             | 7             | 8             | 9                 | 10            | 19,85%        | 13            | 14   |
| 1  | Persentase kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap PAD                     |                                      | -   | 19,75%             | 19,80%        | 19,85%        | 19,90%        | 126,00%           | 136,02%       | 19,90%        | 20%           | Persentase Kontribusi Pajak terhadap PAD tahun 2019 melampaui target karena didalamnya selain realisasi pajak tahun berjalan juga adanya realisasi piutang pajak daerah.   |
| 2  | Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu     |                                      | -   | 100%               | 100%          | 100%          | 100%          | 100,00%           | 100%          | 100%          | 100%          |  |
| 3  | Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Kota Blitar                                   |                                      | -   | 8 Minggu           | 8 Minggu      | 8 Minggu      | 8 Minggu      | 100%              | 100%          | 8 minggu      | 8 minggu      |  |
| 4  | Persentase Perangkat Daerah yang penyerapan anggarannya di atas 90 persen      |                                      | -   | 90%                | 91%           | 92%           | 93%           | 53,33%            | 52,75%        | 93%           | 94%           | Penyerapan anggaran diatas 90% masih belum memenuhi target karena masih banyaknya OPD yang belum menyelesaikan pencairan di akhir tahun disebabkan efisiensi anggaran dan adanya gagal lelang serta keterbatasan waktu |
| 5  | Persentase pemberdayaan aset   |                                      | -   | 93%                | 94%           | 95%           | 96%           | 380,00%           | 0             | 0             | 0             | Dilihat dari proporsi nilai aset tetap yang digunakan untuk operasional.   |
|    | Persentase Perangkat daerah yang menyampaikan Neraca Barang Daerah tepat waktu |                                      |     | 0                  | 0             | 0             | 0             | 106,38%           | 101,75%       | 96%           | 97%           | Hasil rivi SAKIP dilakukan pengantian IKU BPKAD menjadi Persentase perangkat daerah yang menyampaikan Neraca Barang Daerah tepat waktu   |



### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Isu – isu atau permasalahan – permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang, situasi dan kondisi baik dari lingkungan internal maupun eksternalnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi dalam penatausahaan keuangan;
2. Kurangnya pemahaman aparatur dalam memahami peraturan perundangan yang berlaku;
3. Belum optimalnya koordinasi pengelolaan barang daerah sebagai bahan penyusunan laporan keuangan daerah;
6. Belum optimalnya pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di beberapa Perangkat Daerah;
7. Masih rendahnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah dari sebagian pejabat pengelola keuangan Perangkat Daerah;
8. Belum optimalnya penguasaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan di masing-masing Perangkat Daerah;
9. Perlunya produk hukum terbaru berkaitan dengan terbitnya berbagai regulasi baru tentang pajak daerah seperti Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan Standar Operasional Prosedur mengenai pajak daerah;
10. Masih belum optimalnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, di sebabkan belum adanya Tim Pemeriksa Pajak Daerah;
11. Masih terdapatnya piutang pajak baik yang masih dapat ditagih maupun yang sudah kedaluarsa yang belum terselesaikan.



Permasalahan tersebut terjadi karena faktor – faktor yang mempengaruhi antara lain :

1. Kurangnya kesempatan aparatur untuk mengikuti pelatihan – pelatihan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan;
2. Sering terjadinya perubahan peraturan pengelolaan keuangan daerah;
3. Lemahnya koordinasi pengelolaan barang daerah, pengelolaan akuntansi dan dokumen pelengkap sebagai bahan penyusunan laporan keuangan daerah;
4. Masih rendahnya kedisiplinan dan ketaatan SKPD dalam pelaksanaan anggaran;
5. Adanya moratorium pegawai;
6. Tidak lengkapnya berkas pendukung sebagai syarat administrasi penghapusan piutang.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, misalnya rumusan program dan kegiatan baru yang terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan sudah sesuai namun besarannya berbeda.

Pada Riview Rancangan Awal RKPD ada beberapa indikator kegiatan yang belum dimasukkan guna memujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Blitar, yaitu indikator pengintegrasian Aplikasi , penambahan belanja modal software untuk aplikasi pengelolaan keuangan tingkat Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus barang serta Pengelolaan Informasi publik untuk kegiatan Financial On Clinic, kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan , Rapat koordinasi pengelolaan hibah bansos dan kerugian daerah.

Penjelasan tersebut dapat diuraikan pada Tabel 2.4 sebagai berikut :



**Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Tahun**

**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021**  
**Kota Blitar**

**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar**

| Rancangan Awal RKPD |   |             |  |                |                  | Hasil Analisis Kebutuhan  |             |  |                |                    | Catatan Penting |
|---------------------|---|-------------|--|----------------|------------------|---|-------------|--|----------------|--------------------|-----------------|
| No                  | Program / Kegiatan/ sub kegiatan  | Lokasi      | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikati Rp | Program / Kegiatan/sub kegiatan   | Lokasi      | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Kebutuhan Dana Rp. |                 |
| 1                   | 2   | 3           | 4  | 5              | 6                | 7   | 8           | 9  | 10             | 11                 | 12              |
| 1                   | Program penunjang urusan pemerintahan   | Kota Blitar | Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan                                     | 100%           | 2.326.468.750,00 | Program penunjang urusan pemerintahan   | Kota Blitar | Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan                                     | 100%           | 2.326.468.750,00   |                 |
|                     | Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah                        |             | Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun   |                |                  | Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah                        |             | Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun   |                |                    |                 |
|                     | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah                                       |             | Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun ( Renstra, PK, Renaksi, SPP, SOP, Renja , RKA,DPA, PRKA PDPA ) | 10 dok         | 4.972.000        | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah                                       |             | Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun ( Renstra, PK, Renaksi, SPP, SOP, Renja , RKA,DPA, PRKA PDPA ) | 10 dok         | 4.972.000          |                 |
|                     | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD |             | Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun ( LKJIP,LKPJ,LPPD,SKM,SP M, Evaluasi RKPD, Pengukuran kinerja )  | 7 Dok          | 3.115.400        | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD |             | Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun ( LKJIP,LKPJ,LPPD,SKM,SP M, Evaluasi RKPD, Pengukuran kinerja )  | 7 Dok          | 3.115.400          |                 |
|                     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |             | Jumlah jenis laporan keuangan yang tersusun  |                |                  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |             | Jumlah jenis laporan keuangan yang tersusun  |                |                    |                 |
|                     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |             | Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan ASN  | 76 orang       | 9.111.825.087    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |             | Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan ASN  | 76 orang       | 9.111.825.087      |                 |
|                     | Penyediaan Administrasi pelaksanaan   |             | Jumlah pejabat pengelola keuangan dan pengelola barang daerah yang   | 750 org        | 1.181.740.000    | Penyediaan Administrasi pelaksanaan   |             | Jumlah pejabat pengelola keuangan dan pengelola barang daerah yang   | 750 org        | 1.181.740.000      |                 |



### Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Tahun

|  |  |  |  |             |                      |  |  |  |             |                      |  |
|--|--|--|--|-------------|----------------------|--|--|--|-------------|----------------------|--|
|  | tugas ASN  |  | menerima honorarium  |             |                      | tugas ASN  |  | menerima honorarium  |             |                      |  |
|  | Koordinasi dan penyusunan paoran keuangan bulanan/tribulan/semsesteran |  | Jumlaah jenis laporan keuanganyang disusun )<br>CALK, LTR, Neraca, ) |             | 3549200              | Koordinasi dan penyusunan paoran keuangan bulanan/tribulan/semsesteran |  | Jumlaah jenis laporan keuanganyang disusun )<br>CALK, LTR, Neraca, ) |             | 3549200              |  |
|  | <b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>                       |  | <b>Persentase aparatur perangkat daerah yang dilakukan pembinaan</b> |             |                      | <b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>                       |  | <b>Persentase aparatur perangkat daerah yang dilakukan pembinaan</b> |             |                      |  |
|  | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya                 |  | Jumlah pakaian khusus hari hari tertentu                             | 76 buah     | 7.597.8000           | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya                 |  | Jumlah pakaian khusus hari hari tertentu                             | 76 buah     | 7.597.8000           |  |
|  | Sosialisasi peraturan perundang undangan                               |  | Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti             | 5 event     | 65.518.700           | Sosialisasi peraturan perundang undangan                               |  | Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti             | 5 event     | 65.518.700           |  |
|  | <b>Program pengelolaan keuangan daerah</b>                             |  | <b>Persentase peningkatan tertib perencanaan keuangan daerah</b>     | <b>100%</b> | <b>2.282.988.000</b> | <b>Program pengelolaan keuangan daerah</b>                             |  | <b>Persentase peningkatan tertib perencanaan keuangan daerah</b>     | <b>100%</b> | <b>2.282.988.000</b> |  |
|  | Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah                      |  |  |             |                      | Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah                      |  |  |             |                      |  |
|  | Penyusunan dan reviu RKA SKPD / Perubahan RKA SKPD                     |  | Jumlah aplikasi SIPEKS   | 1 aplikasi  | 1.339.273.400        | Penyusunan dan reviu RKA SKPD / Perubahan RKA SKPD                     |  | Jumlah aplikasi SIPEKS   | 1 aplikasi  | 1.339.273.400        |  |
|  |  |  | Jumlah dokumen pengendalian anggaran yang tersusun                   | 4 dokumen   |                      |  |  | Jumlah dokumen pengendalian anggaran yang tersusun                   | 4 dokumen   |                      |  |
|  |  |  | Jumlah dokumen penyusunan analisis standar belanja                   | 1 dokumen   |                      |  |  | Jumlah dokumen penyusunan analisis standar belanja                   | 1 dokumen   |                      |  |
|  |  |  | Jumlah dokumen rancangan regulasi pengelolaan keuangan               | 4 dokumen   |                      |  |  |  |             |                      |  |

Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Tahun



|  |  |  |  |             |             |  |  |  |             |             |  |
|--|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|-------------|-------------|--|
|  |  |  | daerah   |             |             |  |  |  |             |             |  |
|  | Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD |  | Jumlah aplikasi SIPAPBD  | 1 aplikasi  | 936.444.100 | Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD |  | Jumlah aplikasi SIPAPBD  | 1 aplikasi  | 936.444.100 |  |
|  |  |  | Jumlah dokumen rancangan Perda APBD D dan rancangan perwal tentang Penjabaran APBD           | 2 dokumen   |             |  |  | Jumlah dokumen rancangan Perda APBD D dan rancangan perwal tentang Penjabaran APBD           | 2 dokumen   |             |  |
|  |  |  | Jumlah dokumen rancangan perda tentang P APBD dan rancangan perwal tentang Penjabaran P APBD | 2 dokumen   |             |  |  | Jumlah dokumen rancangan perda tentang P APBD dan rancangan perwal tentang Penjabaran P APBD | 2 dokumen   |             |  |
|  |  |  | Jumlah peserta bintek / sosialisasi penyusunan APBD  | 110 peserta |             |  |  | Jumlah peserta bintek / sosialisasi penyusunan APBD  | 110 peserta |             |  |
|  | <b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>   |  | <b>Persentase peningkatan tertib perencanaan keuangan daerah</b>                             | <b>100%</b> |             |  |  | <b>Persentase peningkatan tertib perencanaan keuangan daerah</b>                             | <b>100%</b> |             |  |
|  | <b>Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah</b>                    |  |  |             |             | <b>Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah</b>                    |  |  |             |             |  |
|  | Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD                            |  | Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD hasil rekonsiliasi                                      | 402 dok     | 91.340.800  | Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD                            |  | Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD hasil rekonsiliasi                                      | 402 dok     | 91.340.800  |  |



## Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Tahun

|  |  |  |  |       |             |  |  |  |       |             |  |
|--|--|--|--|-------|-------------|--|--|--|-------|-------------|--|
|  | Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD propinsi dan kab/Kota |  | Jumlah dokumen rancangan peraturan daerah dan peraturan walikota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | 2 dok | 123.716.800 | Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD propinsi dan kab/Kota |  | Jumlah dokumen rancangan peraturan daerah dan peraturan walikota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | 2 dok | 123.716.800 |  |
|  | Koordinasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan Keuangan PEMDA  |  | Jumlah konsolidasi laporan keuangan  | 1 dok | 74.200      | Koordinasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan Keuangan PEMDA  |  | Jumlah konsolidasi laporan keuangan  | 1 dok | 74.200      |  |
|  | Penyusunan tanggapan / tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD                 |  | Jumlah dokumen tanggapan / tindak lanjut LHP BPK   | 1 dok | 275.800     | Penyusunan tanggapan / tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD                 |  | Jumlah dokumen tanggapan / tindak lanjut LHP BPK   | 1 dok | 275.800     |  |
|  | Rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan   |  | Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis   | 1 dok | 48.061.900  | Rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan   |  | Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis   | 1 dok | 48.061.900  |  |
|  | Penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD  |  | Jumlah dokumen analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD  | 1 dok | 260.400     | Penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD  |  | Jumlah dokumen analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD  | 1 dok | 260.400     |  |
|  | Penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggara  |  | Jumlah dokumen kebijakan akuntansi   | 1 dok | 151.220.000 | Penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggara akuntansi  |  | Jumlah dokumen kebijakan akuntansi   | 1 dok | 151.220.000 |  |



Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Tahun

|  |   |  |  |               |             |   |  |  |               |             |  |
|--|---|--|--|---------------|-------------|---|--|--|---------------|-------------|--|
|  | an akuntansi pemerintah daerah n panduan  |  |  |               |             | pemerintah daerah n panduan   |  |  |               |             |  |
|  | Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah   |  | Jumlah dokumen dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan         | 1 dok         | 58.498.200  | Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah |  | Jumlah dokumen dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan         | 1 dok         | 58.498.20   |  |
|  |   |  | <b>Upgrade sistem informasi pengelolaan keuangan daerah</b>          | <b>1 kali</b> |             |   |  | <b>1. Upgrade sistem informasi pengelolaan keuangan daerah</b>       | <b>1 kali</b> |             |  |
|  | Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah |  | Jumlah pembinaan / sosialisasi yang terlaksana                       | 100 org       | 23.322.300  |   |  | Jumlah pembinaan / sosialisasi yang terlaksana                       | 100 org       | 23.322.300  |  |
|  | Program Pengelolaan Keuangan Daerah   |  |  |               |             | Program Pengelolaan Keuangan Daerah   |  |  |               |             |  |
|  | Koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah  |  |  |               |             | Koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                  |  |  |               |             |  |
|  | Koordinasi dn Pengelolaan Kas Daerah  |  | Jumlah dokumen serapan anggaran kas yang dimonitoring dan dievaluasi | 272 dok       | 5.000.000   | Koordinasi dn Pengelolaan Kas Daerah  |  | Jumlah dokumen serapan anggaran kas yang dimonitoring dan dievaluasi |               |             |  |
|  | Koordinasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya   |  | Jumlah laporan dana perimbangan dan dtransfer lainnya yang dimonev   | 25 lap        | 159.946.400 | Koordinasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya                 |  | Jumlah laporan dana perimbangan dan dtransfer lainnya yang dimonev   | 25 lap        | 159.946.400 |  |
|  |   |  | Jumlah pemeliharaan aplikasi SIPKD                                   | 1 aplikasi    |             |   |  | Jumlah pemeliharaan aplikasi SIPKD                                   | 1 aplikasi    |             |  |





# Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Tahun

|  |  |  |  |            |            |  |  |  |            |            |  |
|--|--|--|--|------------|------------|--|--|--|------------|------------|--|
|  |  |  | Jumlah laporan investasi dalir dan penyertaan modal yang dimonev | 28 lap     |            |  |  | Jumlah laporan investasi dalir dan penyertaan modal yang dimonev | 28 lap     |            |  |
|  | Pemrosesan , penerbitan dan penditribusan lembar SP2D  |  | Jumlah lembar SP2D dalam setahun                                 | 20.000 dok | 90.873.100 |  | Pemrosesan , penerbitan dan penditribusan lembar SP2D  | Jumlah lembar SP2D dalam setahun                                 | 20.000 dok | 90.873.100 |  |
|  | Koordinasi pelaksanaan dan penelitian dokumen SPP dan SPM ,pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan Non gaji , serta penerbitan SKPP |  | Jumlah dokumen penggajian PNSD Pemkot Blitar dalam setahun       | 6 dok      |            |  | Koordinasi pelaksanaan dan penelitian dokumen SPP dan SPM ,pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan Non gaji , serta penerbitan SKPP | Jumlah dokumen penggajian PNSD Pemkot Blitar dalam setahun       | 6 dok      |            |  |
|  |  |  | Jumlah dokumen penggajian Pemkot Blitar dalam setahun            | 100 dok    |            |  |  | Jumlah dokumen penggajian Pemkot Blitar dalam setahun            | 100 dok    |            |  |
|  |  |  | Jumlah dokumen penggajian Pemkot Blitar dalam setahun            | 720 dok    |            |  |  | Jumlah dokumen penggajian Pemkot Blitar dalam setahun            | 720 dok    |            |  |
|  |  |  | Jumlah dokumen SPP/SPM pembiayaan yang diverifikasi              | 2 dok      |            |  |  | Jumlah dokumen SPP/SPM pembiayaan yang diverifikasi              | 2 dok      |            |  |
|  |  |  | Jumlah dokumen SPP/SPM pembiayaan yang diverifikasi              | 20.000 dok |            |  |  | Jumlah dokumen SPP/SPM pembiayaan yang diverifikasi              | 20.000 dok |            |  |
|  |  |  | Jumlah pengesahan Dana BOS                                       | 684 dok    |            |  |  | Jumlah pengesahan Dana BOS                                       | 684 dok    |            |  |
|  | Koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah , laporan aliran kas dan pelaksanaan   |  | Jumlah dokumen SP3B yang diterbitkan                             | 36 laporan |            |  | Koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah , laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan . / pemotongan dan penyetoran      | Jumlah dokumen SP3B yang diterbitkan                             | 36 laporan |            |  |

Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Tahun



|  |   |  |   |          |             |   |  |   |          |             |  |
|--|---|--|---|----------|-------------|---|--|---|----------|-------------|--|
|  | pemungutan .<br>/ pemotongan<br>dan penyeteroran<br>perhitungan<br>fihak ketiga ( PFK )   |  |   |          |             | perhitungan fihak<br>ketiga ( PFK )   |  |   |          |             |  |
|  |   |  | Jumlah BUD yang tersusun  | 245 lap  |             |   |  | Jumlah BUD yang tersusun  | 245 lap  |             |  |
|  |   |  | Jumlah laporan posisi kas<br>dan perkiraan belanja yang<br>tersusun               | 24 lap   |             |   |  | Jumlah laporan posisi kas<br>dan perkiraan belanja yang<br>tersusun               | 24 lap   |             |  |
|  | Rekonsiliasi<br>data<br>penerimaan<br>dan<br>pengeluaran<br>kas serta<br>pemungutan<br>dan<br>pemotongan<br>atas SP2D<br>dengan<br>instansi terkait |  | Jumlah berita acara<br>rekonsiliasi laporan<br>fungsional                         | 356 dok  |             | Rekonsiliasi data<br>penerimaan dan<br>pengeluaran kas<br>serta pemungutan<br>dan pemotongan<br>atas SP2D<br>dengan instansi<br>terkait |  | Jumlah berita acara<br>rekonsiliasi laporan<br>fungsional                         | 356 dok  |             |  |
|  |   |  | Jumlah peserta yang<br>melaksanakan<br>rekonsiliasi belanja dan<br>pendapatan OPD | 1068 lap |             |   |  | Jumlah peserta yang<br>melaksanakan<br>rekonsiliasi belanja dan<br>pendapatan OPD | 1068 lap |             |  |
|  | Pelaksanaan<br>pengendalian<br>dan penerbitan<br>anggaran kas<br>dan SPD  |  | Jumlah anggaran kas yang<br>tersusun  | 2 dok    |             | Pelaksanaan<br>pengendalian dan<br>penerbitan<br>anggaran kas dan<br>SPD  |  | Jumlah anggaran kas yang<br>tersusun  | 2 dok    |             |  |
|  |   |  | Jumlah SPD yang<br>diterbitkan  | 272 dok  |             |   |  | Jumlah SPD yang<br>diterbitkan  | 272 dok  |             |  |
|  | Program<br>pengelolaan<br>pendapatan<br>daerah  |  | Persentase peningkatan<br>target pajak daerah                                     | 48 %     |             | Program<br>pengelolaan<br>pendapatan<br>daerah  |  | Persentase peningkatan<br>target pajak daerah                                     | 48 %     |             |  |
|  | Penyusunan<br>kebijakan<br>teknis<br>perencanaan<br>dan<br>pengembangan<br>pendapatan<br>daerah   |  | Jumlah dokumen potensi<br>sumber sumber<br>pendapatan daerah                      | 3 dok    | 148.843.200 | Penyusunan<br>kebijakan teknis<br>perencanaan dan<br>pengembangan<br>pendapatan<br>daerah   |  | Jumlah dokumen potensi<br>sumber sumber<br>pendapatan daerah                      | 3 dok    | 148.843.200 |  |



# **Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Tahun**

|  |  |  |   |               |               |  |  |   |               |               |  |
|--|--|--|---|---------------|---------------|--|--|---|---------------|---------------|--|
|  | Penyusunan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah               |  | Jumlah jenis piutang pajak daerah   | 5 pajak       | 1.021.000.400 | Penyusunan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah               |  | Jumlah jenis piutang pajak daerah   | 5 pajak       | 1.021.000.400 |  |
|  |  |  | Jumlah wajib pajak yang menyelesaikan kewajiban   | 49095 wp      |               |  |  | Jumlah wajib pajak yang menyelesaikan kewajiban   | 49095 wp      |               |  |
|  | Konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi                                      |  | Jumlah dokumen keberatan wajib pajak daerah   | 215 dok       | 196.679.500   | Konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi                                      |  | Jumlah dokumen keberatan wajib pajak daerah   | 215 dok       | 196.679.500   |  |
|  |  |  | Jumlah peserta sosilissi publikasi pajak daerah   | 100 org       |               |  |  | Jumlah peserta sosilissi publikasi pajak daerah   | 100 org       |               |  |
|  | Perumusan standrisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah     |  | Jumlah laporan dokumen laporan realisasi PAD yang tersusun                                  | 12 dok        | 478.265.300   | Perumusan standrisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah     |  | Jumlah laporan dokumen laporan realisasi PAD yang tersusun                                  | 12 dok        | 478.265.300   |  |
|  |  |  | Jumlah peserta rapat koordinasi regulasi pendapatan asli daerah                             | 40 dok        |               |  |  | Jumlah peserta rapat koordinasi regulasi pendapatan asli daerah                             | 40 dok        |               |  |
|  | Perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis Teknologi informasi |  | Jumlah data PBB P-2 yang telah dimutakhirkan  | 50.000 SPT    | 486.313.300   | Perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis Teknologi informasi |  | Jumlah data PBB P-2 yang telah dimutakhirkan  | 50.000 SPT    | 486.313.300   |  |
|  |  |  | Jumlah media publikasi himbuan pjak daerah BPKAD  | 6 Buah        |               |  |  | Jumlah media publikasi himbuan pjak daerah BPKAD  | 6 Buah        |               |  |
|  |  |  | Jumlah paket sistem aplikasi pengeelolaan sarana dan prasarana pajak daerah yang terpelihra | 3 plikasi     |               |  |  | Jumlah paket sistem aplikasi pengeelolaan sarana dan prasarana pajak daerah yang terpelihra | 3 plikasi     |               |  |
|  | Pemeliharaan dan pemutakhiran bsis dta pajak daerah dan retribusi daerah                   |  | Jumlah jenis pajak yang dimutakhirkan   | 9 jenis pajak | 172.682.150   | Pemeliharaan dan pemutakhiran bsis dta pajak daerah dan retribusi daerah                   |  | Jumlah jenis pajak yang dimutakhirkan   | 9 jenis pajak | 172.682.150   |  |



## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2016 tentang tugas, pokok, fungsi dari BPKAD adalah melakukan pengelolaan dari fungsi Pendapatan daerah dari Sektor Pajak, Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk Tahun 2021 dari Pengelolaan pendapatan lebih difokuskan pada peningkatan Pajak daerah melalui Pengembangan Sistem Aplikasi Pendapatan utamanya PBB, BPHTB , Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terintegrasi dengan metode pembayaran non tunai, hal ini telah didukung dengan adanya kerjasama dengan Pihak Bank, untuk memudahkan pembayaran para Wajib Pajak melalui Mobile Banking keliling , SMS Banking. Hal ini sejalan dengan Rencana Kerja Kementerian Keuangan kaitannya dengan terjaganya kesinambungan fiskal untuk meningkatkan Penerimaan fiskal negara.

Sedangkan dari Pengelolaan Keuangan BPKAD di Tahun 2021 memfokuskan diri pada Pengelolaan Akuntansi tingkat bawah yaitu tertib penatausahaan dan entry data oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang serta mengaktifkan fungsi dari PPTK dan PPK di masing-masing Bidang. Monitoring dan evaluasi serapan anggaran terkait dengan pemberlakuan Transaksi Non Tunai dan paperless dokumen pencairan, hal ini dikarenakan fungsi verifikasi dari kebenaran/keabsahan dokumen belanja/pencairan (kuitansi, nota belanja dll) berada di verifikator masing-masing OPD. Mulai dilakukannya survey pemutakhiran data Aset di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Blitar.

Untuk Pengelolaan di bidang perencanaan, akuntansi dan aset yang umumnya bersifat rutin setiap tahun, akan lebih ditingkatkan dalam segi administratif,

## ***Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Tahun***



membina OPD untuk lebih tertib dan cermat dalam menyusun Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Inventarisasi Barang Daerah.



### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun Program Pembangunan Nasional (Propenas). Propenas merupakan rencana induk pembangunan perencanaan nasional hasil konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Dengan demikian, fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah pemerintahan daerah di seluruh Indonesia dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun kedepan.

Untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi makro, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas-tugas desentralisasinya, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan pelaksanaan program pembangunan daerah Pemerintah Kota Blitar menyusun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada Propenas dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan kedua hal tersebut, untuk mewujudkan keselarasan antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, masing-masing Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda), walaupun dimungkinkan adanya perbedaan prioritas menurut kebutuhan daerah dengan pendekatan bersifat strategis dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang baik, memperkuat landasan pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta meningkatkan pembangunan daerah. Untuk program kegiatan di daerah terlebih dahulu perlu dilakukan



identifikasi terhadap kebijakan nasional, sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional**

4

| No. | Kebijakan Nasional                                     | Sumber | Keterangan |
|-----|--|--------|------------|
| 1   | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah    | APBN   |            |
| 2   | Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah | APBN   |            |
| 3   | Kapasitas Keuangan Daerah                              | APBN   |            |
| 4   | Peningkatan Kerjasama Antar Daerah                     | APBN   |            |

Dari keempat kebijakan tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, maka dalam menyusun program kegiatannya BPKAD Kota Blitar mengacu pada kebijakan nasional "Kapasitas Keuangan Daerah", sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja BPKAD pada tahun-tahun sebelumnya.



### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah.

Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan **tujuan, sasaran dan indikator sasaran** yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Sasaran BPKAD

| No | Tujuan/Sasaran  | Indikator Kinerja/Sasaran   | Target        | Realisasi     | Target        |
|----|---|---|---------------|---------------|---------------|
|    |   |   | 2020          |               | 2021          |
| 1. | <b>Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b> | <b>Persentase Pendapatan Pajak Daerah Terhadap PAD</b>                        | <b>19,90%</b> | <b>19,82%</b> | <b>20,00%</b> |
| 1. | Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD                 | Persentase pendapatan pajak daerah terhadap PAD                               | 19,90%        | 19,82%        | 20,00%        |
|    |   | <b>Persentase PD yang menyusun Dokumen Keuangan daerah tepat waktu</b>        | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   |
| 2  | Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah        | a) Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan keuangan tepat waktu | 100%          | 100%          | 100%          |
|    |   | b) Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Kota Blitar                               | 8 minggu      | 8 minggu      | 8 minggu      |
|    |   | c) Persentase Perangkat Daerah yang penyerapannya anggarannya                 | 93%           | 66,18%        | 94%           |



## Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Tahun



|  |  |   |     |      |     |
|--|--|---|-----|------|-----|
|  |  | diatas 90%  |     |      |     |
|  |  | d) Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Neraca Barang Daerah tepat waktu | 96% | 100% | 97% |

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program kerja BPKAD Kota Blitar. Sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, OPD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/ Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BPKAD Kota Blitar dalam menyusun programnya bersifat reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, utamanya di bidang pendapatan keuangan dan aset daerah.

Adapun pada tahun 2021 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah mengajukan perubahan nama-nama program dalam rangka penyederhanaan dan penyempurnaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagai berikut:

## ***Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Tahun***



1. Program Pelayanan Perkantoran;
2. Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah ;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Perencanaan Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
5. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan Keuangan Daerah;
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah;
8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah;
9. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah.



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai instrumen untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan.

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

#### **1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah**

Perumusan program dan kegiatan di BPKAD Kota Blitar diarahkan untuk mencapai visi dan misi Walikota Blitar sehingga program dan kegiatan dalam Renja BPKAD kota Blitar merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Walikota Blitar.

#### **2. Pencapaian SDG's**

Sustainable Development Goals merupakan kesepakatan dari negara – negara di dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ketiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya.

Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara – negara yang ikut menandatangani SDG's, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target SDG's. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target – target SDG's ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja BPKAD Kota Blitar diimplementasikan untuk mencapai target – target SDG's.



### 3. Pemberantasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara – negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memnuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan malah glbal yang butuh perhatian serius.

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Blitar. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2021 diarahkan pada upaya peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat serta penguatan infrastruktur kota.

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan BPKAD Kota Blitar tahun 2021 adalah 9 program dan 27 kegiatan. Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel berikut :



## Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Tahun

**Tabel 4**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan**  
**Prakiraan maju Tahun 2022 Kota Blitar**

### Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah dan<br>Program/Kegiatan                     | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (Tahun<br>Rencana)   |                              |  |                             | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju<br>Rencana Tahun 2022 |   |
|------|----|----|----|---|--|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------|---|
|      |    |    |    |   |  | Lokasi  | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kinerja<br>Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif | Indikatif<br>Sumber<br>Dana |                    | Target<br>Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan<br>Dana/<br>Pagu<br>Indikatif |
| (1)  |    |    |    | (2)   | (3)  | (4)   | (5)                          | (6)  | (7)                         | (8)                | (9)                                  | (10)                                    |
| 4    | 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan<br>Perkantoran  | Kota Blitar                                  | Persentase Kecukupan<br>pelayanan perkantoran   | 100%                         | 2.326.468.750,00                               | DAU                         |                    | 100%                                 | 2.326.468.750,00                        |
|      |    |    | 01 | Pengelolaan<br>Administrasi<br>Perkantoran  | Kota Blitar                                  | Jumlah alat tulis yang tersedia   | 38 macam                     | 459.610.050,00                                 | DAU                         |                    | 38 macam                             | 459.610.050,00                          |
|      |    |    |    |   |  | jumlah barang cetakan yang<br>tersedia  | 12 cetakan                   |  |                             |                    | 12 cetakan                           |   |
|      |    |    |    |   |  | Jumlah peralatan rumah<br>tangga kantor yang tersedia                                 | 35 macam                     |  |                             |                    | 35 macam                             |   |
|      |    |    |    |   |  | Jumlah bahan bacaan dan<br>peraturan perundang-<br>undangan yang tersedia             | 2 bahan<br>bacaan            |  |                             |                    | 2 bahan bacaan                       |   |
|      |    |    |    |   |  | Jumlah porsi mamin yang<br>tersedia   | 257 porsi                    |  |                             |                    | 257 porsi                            |   |
|      |    |    | 02 | Rapat-rapat koordinasi<br>dan konsultasi dalam<br>dan luar daerah                             | Kota Blitar                                  | Jumlah rapat-rapat koordinasi<br>dan konsultasi regional dan<br>nasional yang diikuti | 108 rakor                    | 433.192.000,00                                 |                             |                    | 108 rakor                            | 433.192.000,00                          |
|      |    |    | 04 | Penyusunan<br>Perencanaan<br>Pengelolaan Dana<br>Pelaporan Sarana<br>Prasarana<br>Perkantoran | Kota Blitar                                  | jumlah rekening yang terbayar   | 6 rekening                   | 279.649.200,00                                 |                             |                    | 6 rekening                           | 279.649.200,00                          |
|      |    |    |    |   |  | jumlah kendaraan dinas yang<br>terbayarkan pajaknya                                   | 44 unit                      |  |                             |                    | 44 unit                              |   |

## Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Tahun



|          |           |           |           |   |                    |  |             |                      |            |  |             |                      |
|----------|-----------|-----------|-----------|---|--------------------|--|-------------|----------------------|------------|--|-------------|----------------------|
|          |           |           |           |   |                    | jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia                                 | 27 komponen |                      |            |  | 27 komponen |                      |
|          |           |           |           |   |                    | jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi   | 5 macam     |                      |            |  | 5 macam     |                      |
|          |           |           |           |   |                    | jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi  | 6 macam     |                      |            |  | 6 macam     |                      |
|          |           |           |           |   |                    | jumlah gedung kantor yang terpelihara  | 2 unit      |                      |            |  | 2 unit      |                      |
|          |           |           |           |   |                    | jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara  | 3 unit      |                      |            |  | 3 unit      |                      |
|          |           |           |           |   |                    | jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara   | 2 macam     |                      |            |  | 2 macam     |                      |
|          |           |           |           |   |                    | jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara  | 5 macam     |                      |            |  | 5 macam     |                      |
|          |           |           | <b>05</b> | Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah | Kota Blitar        | Jumlah jenis dokumen ketatalaksanaan yang tersusun (SAKIP, PK, IKU, IKI, SPIP, SPM, SOP, LKJIP, LPPD, IKM) | 10 dok      | 3.117.500,00         |            |  | 10 dok      | 3.117.500,00         |
|          |           |           | <b>06</b> | Penyusunan Laporan Keuangan                               | Kota Blitar        | Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun (antara lain untuk CALK, Neraca, Semesteran)           | 5 dokumen   | 1.150.900.000,00     |            |  | 5 dokumen   | 1.150.900.000,00     |
|          |           |           |           |   |                    | jumlah dokumen penyelesaian kerugian negara/daerah yang tersedia   | 2 dokumen   |                      |            |  | 2 dokumen   |                      |
|          |           |           |           |   |                    | Jumlah sosialisasi/rapat koordinasi hibah dan bansos   | 120 orang   |                      |            |  | 120 orang   |                      |
|          |           |           |           |   |                    | Jumlah pejabat pengelola keuangan dan pengelola barang daerah yang menerima honorarium                     | 750 orang   |                      |            |  | 750 orang   |                      |
| <b>4</b> | <b>04</b> | <b>01</b> | <b>02</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah</b>     | <b>Kota Blitar</b> | <b>Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda Pemda Kota Blitar</b>                           | <b>100%</b> | <b>73.747.000,00</b> | <b>DAU</b> |  | <b>100%</b> | <b>73.747.000,00</b> |
|          |           |           | <b>01</b> | Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian      | Kota Blitar        | Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti   | 5 event     | 53.647.000,00        |            |  | 5 event     | 53.647.000,00        |
|          |           |           |           |   |                    | Jumlah asn yang mengikuti bimtek peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan                                | 75 orang    |                      |            |  | 75 orang    |                      |
|          |           |           | <b>02</b> | Pengelolaan publikasi dan informasi                       | Kota Blitar        | Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat  | 2 publikasi | 20.000.000,00        |            |  | 2 publikasi | 20.000.000,00        |

## Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Tahun



|   |    |    |    |  |             |  |              |                |     |  |              |                  |
|---|----|----|----|--|-------------|--|--------------|----------------|-----|--|--------------|------------------|
| 4 | 04 | 01 | 03 | perangkat daerah   | Kota Blitar | daerah   |              |                |     |  |              |                  |
|   |    |    |    | <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Daerah</b> | Kota Blitar | <b>Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan</b> | 100%         | 4.999.900,00   | DAU |  | 100%         | 4.999.900,00     |
|   |    |    | 01 | Penyusunan Dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah                            | Kota Blitar | Jumlah dokumen yang tersusun (Renstra, Renja , RKA,DPA dan DPPA)   | 6 dokumen    | 4.999.900,00   |     |  | 6 dokumen    | 4.999.900,00     |
| 4 | 04 | 01 | 05 | <b>Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah</b>        | Kota Blitar | <b>Persentase peningkatan tertib penatausahaan keuangan daerah</b>   | 94 %         | 417.723.400,00 | DAU |  | 95 %         | 417.723.400,00   |
|   |    |    | 01 | Pelaksanaan Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah                                     | Kota Blitar | JumlahDokumen SPP/SPM yang diverifikasi  | 15000 spm    | 239.480.000,00 |     |  | 15000 spm    | 239.480.000,00   |
|   |    |    |    |  |             | Jumlah peserta Sosialisasi/Rapat Koordinasi Penatausahaan Keuangan   | 150 peserta  |                |     |  | 150 peserta  |                  |
|   |    |    |    |  |             | Jumlah Peserta yang Melaksanakan Rekonsiliasi belanja dan Pendapatan OPD   | 360 peserta  |                |     |  | 360 peserta  |                  |
|   |    |    |    |  |             | Jumlah OPD yang dimonev penyerapan anggarannya   | 75 OPD       |                |     |  | 75 OPD       |                  |
|   |    |    |    |  |             | Jumlah Dokumen penggajian PNSD pemerintah daerah Kota Blitar dalam setahun                                       | 1140 dokumen |                |     |  | 1140 dokumen |                  |
|   |    |    | 02 | Peningkatan Pengelolaan Kas dan Investasi Daerah   | Kota Blitar | Jumlah Dokumen anggaran kas yang dimonitoring dan dievaluasi   | 544 dokumen  | 178.243.400,00 |     |  | 544 dokumen  | 178.243.400,00   |
|   |    |    |    |  |             | Jumlah investasi daerah yang dimonitoring dalam setahun  | 32 dokumen   |                |     |  | 32 dokumen   |                  |
|   |    |    |    |  |             | Jumlah paket aplikasi SIPKD yang terpelihara   | 1 paket      |                |     |  | 1 paket      |                  |
| 4 | 04 | 01 | 06 | <b>Program Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah</b>          | Kota Blitar | <b>Persentase Peningkatan target pajak daerah</b>  | 3            | 4              | DAU |  | 48 %         | 1.443.019.780,00 |

## Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Tahun



|          |           |           |           |  |                    |   |             |                         |            |  |             |                         |
|----------|-----------|-----------|-----------|--|--------------------|---|-------------|-------------------------|------------|--|-------------|-------------------------|
|          |           |           | <b>01</b> | Pengadaan dan Pengelolaan Sistem Aplikasi dan Informasi Pajak Daerah | Kota Blitar        | Jumlah paket sistem aplikasi pengelolaan sarana dan prasarana pajak daerah yang terpelihara | 3 aplikasi  | 583.421.250,00          |            |  | 3 aplikasi  | 583.421.250,00          |
|          |           |           |           |  |                    | Jumlah Data PBB-P2 yang telah dimutakhirkan   | 50 data     |                         |            |  | 50 data     |                         |
|          |           |           |           |  |                    | Jumlah media publikasi himbauan pajak daerah BPKAD  | 4 media     |                         |            |  | 4 media     |                         |
|          |           |           | <b>02</b> | Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah                               | Kota Blitar        | Jumlah Wajib Pajak Daerah yang didata.  | 52.276 WP   | 329.008.000,00          |            |  | 52.276 WP   | 329.008.000,00          |
|          |           |           | <b>03</b> | Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah                                 | Kota Blitar        | Jumlah dokumen penetapan pajak  | 52.276 WP   | 531.590.500,00          |            |  | 52.276 WP   | 531.590.500,00          |
|          |           |           |           |  |                    | Jumlah Peserta Sosialisasi Pajak daerah   | 100 orang   |                         |            |  | 100 orang   |                         |
| <b>4</b> | <b>04</b> | <b>01</b> | <b>07</b> | <b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                         | <b>Kota Blitar</b> | <b>Persentase peningkatan Realisasi Pajak daerah</b>  | <b>38 %</b> | <b>1.369.446.300,00</b> | <b>DAU</b> |  | <b>48 %</b> | <b>1.369.446.300,00</b> |
|          |           |           | <b>01</b> | Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah                                 | Kota Blitar        | Jumlah wajib pajak yang menyelesaikan kewajiban   | 49095 WP    | 1.064.601.000,00        |            |  | 49095 WP    | 1.064.601.000,00        |
|          |           |           |           |  |                    | Jumlah jenis piutang Pajak daerah   | 5 pajak     |                         |            |  | 5 pajak     |                         |
|          |           |           | <b>02</b> | Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah     | Kota Blitar        | Jumlah dokumen potensi sumber-sumber pendapatan daerah                                      | 3 dokumen   | 148.964.600,00          |            |  | 3 dokumen   | 148.964.600,00          |
|          |           |           |           |  |                    | Jumlah Laporan dokumen Laporan Realisasi PAD yang disusun                                   | 12 dokumen  |                         |            |  | 12 dokumen  |                         |
|          |           |           |           |  |                    | Jumlah peserta rapat koordinasi dan evaluasi PAD  | 40 opd      |                         |            |  | 40 opd      |                         |
|          |           |           |           |  |                    | Jumlah rancangan dokumen regulasi Pendapatan Asli Daerah                                    | 2 dokumen   |                         |            |  | 2 dokumen   |                         |
|          |           |           | <b>03</b> | Pembinaan & Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                      | Kota Blitar        | Jumlah dokumen keberatan wajib pajak daerah   | 215 dokumen | 155.880.700,00          | <b>DAU</b> |  | 215 dokumen | 155.880.700,00          |
|          |           |           |           |  |                    | Jumlah Media Publikasi Pajak Daerah   | 2 media     |                         |            |  | 2 paket     |                         |
|          |           |           |           |  |                    | Jumlah Peserta Sosialisasi Publikasi Pajak Daerah   | 100 orang   |                         |            |  | 100 orang   |                         |



## Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Tahun



|   |    |    |    |  |             |   |            |                  |     |  |            |                  |
|---|----|----|----|--|-------------|---|------------|------------------|-----|--|------------|------------------|
| 4 | 04 | 01 | 08 | Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah                                 | Kota Blitar | Persentase penyajian data keuangan dan aset daerah  | 94%        | 1.325.362.650,00 | DAU |  | 95%        | 1.325.362.650,00 |
|   |    |    | 01 | Perencanaan Kebutuhan, Standarisasi dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah                      | Kota Blitar | Jumlah dokumen daftar kebutuhan barang yang tersusun  | 4 dokumen  | 565.873.650,00   |     |  | 4 dokumen  | 565.873.650,00   |
|   |    |    |    |  |             | Jumlah Aset daerah yang terfasilitasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah | 2 BMD      |                  |     |  | 2 BMD      |                  |
|   |    |    |    |  |             | Jumlah dokumen standarisasi harga barang dan jasa yang tersusun                                 | 2 dokumen  |                  |     |  | 2 dokumen  |                  |
|   |    |    |    |  |             | Jumlah Penilaian Publik atas sewa BMD   | 1 BMD      |                  |     |  | 1 BMD      |                  |
|   |    |    | 02 | Peningkatan Manajemen Aset Barang Daerah   | Kota Blitar | Jumlah SDM pengelola barang yang mengikuti pengembangan kapasitas                               | 50 orang   | 759.489.000,00   |     |  | 80 orang   | 759.489.000,00   |
|   |    |    |    |  |             | Jumlah peserta yang melaksanakan kegiatan rekonsiliasi aset dalam 1 (satu) tahun                | 284 orang  |                  |     |  | 284 orang  |                  |
|   |    |    |    |  |             | Jumlah Aset yang didata   | 50 buah    |                  |     |  | 50 buah    |                  |
| 4 | 04 | 01 | 09 | Program Peningkatan Dan Pengembangan Perencanaan Keuangan Daerah                             | Kota Blitar | Prosentase Perangkat Daerah yang tertib perencanaan keuangan daerah                             | 100%       | 1.339.288.800,00 | DAU |  | 100%       | 1.339.288.800,00 |
|   |    |    | 01 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD | Kota Blitar | Jumlah dokumen rancangan perda tentang APBD dan rancangan perwali tentang Penjabaran APBD       | 2 dokumen  | 451.151.800,00   |     |  | 2 dokumen  | 451.151.800,00   |
|   |    |    |    |  |             | Jumlah peserta Bimtek/Sosialisasi Penyusunan APBD   | 90 orang   |                  |     |  | 90 orang   |                  |
|   |    |    |    |  |             | Jumlah Aplikasi SIPAPBD   | 1 Aplikasi |                  |     |  | 1 Aplikasi |                  |
|   |    |    | 02 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang  | Kota Blitar | Jumlah dokumen rancangan perda tentang Perubahan APBD dan dokumen                               | 2 dokumen  | 229.293.100,00   |     |  | 2 dokumen  | 229.293.100,00   |

## Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Tahun



|          |           |           |           |   |                    |  |             |                       |            |             |                       |
|----------|-----------|-----------|-----------|---|--------------------|--|-------------|-----------------------|------------|-------------|-----------------------|
|          |           |           |           | Perubahan APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD                |                    | rancangan perwali tentang Penjabaran Perubahan APBD  |             |                       |            |             |                       |
|          |           |           | <b>03</b> | Penyusunan analisis standar belanja   | Kota Blitar        | Jumlah dokumen penyusunan analisa standar belanja  | 1 dokumen   | 230.613.900,00        |            | 1 dokumen   | 230.613.900,00        |
|          |           |           | <b>04</b> | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD  | Kota Blitar        | Jumlah aplikasi SIPEKS   | 1 aplikasi  | 172.215.600,00        |            | 1 aplikasi  | 172.215.600,00        |
|          |           |           |           |   |                    | Jumlah petunjuk teknis APBD  | 1 dokumen   |                       |            | 1 dokumen   |                       |
|          |           |           |           |   |                    | Jumlah dokumen pengendalian anggaran yang tersusun   | 4 dokumen   |                       |            | 4 dokumen   |                       |
|          |           |           | <b>05</b> | Pendampingan Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah            | Kota Blitar        | Jumlah dokumen Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah  | 4 dokumen   | 256.014.400,00        |            | 4 dokumen   | 256.014.400,00        |
| <b>4</b> | <b>04</b> | <b>01</b> | <b>10</b> | <b>Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah</b> | <b>Kota Blitar</b> | <b>persentase perangkat daerah yang tertib laporan keuangan dan pengelolaan akuntansi keuangan daerah</b>  | <b>100%</b> | <b>468.445.400,00</b> | <b>DAU</b> | <b>100%</b> | <b>468.445.400,00</b> |
|          |           |           | <b>01</b> | Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah         | Kota Blitar        | Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD hasil rekonsiliasi  | 402 dokumen | 121.404.000,00        |            | 402 dokumen | 121.404.000,00        |
|          |           |           |           |   |                    | Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya yang tersusun  | 1 dokumen   |                       |            | 1 dokumen   |                       |
|          |           |           | <b>02</b> | Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                    |                    | Jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | 2 dokumen   | 125.000.000,00        |            | 2 dokumen   | 125.000.000,00        |
|          |           |           |           |   |                    | Jumlah dokumen laporan keuangan konsolidasian  | 12 dokumen  |                       |            | 12 dokumen  |                       |
|          |           |           | <b>03</b> | Penyusunan kebijakan Akuntansi pemerintah daerah                                  | Kota Blitar        | Jumlah dokumen perubahan kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang  | 1 dokumen   | 142.220.000,00        |            | 1 dokumen   | 142.220.000,00        |

## Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Tahun



|  |  |  |           |  |             |  |            |               |  |  |            |               |
|--|--|--|-----------|--|-------------|--|------------|---------------|--|--|------------|---------------|
|  |  |  |           |  |             | tersusun   |            |               |  |  |            |               |
|  |  |  | <b>04</b> | Pengembangan sistem aplikasi Akuntansi Keuangan Daerah | Kota Blitar | Jumlah Aplikasi akuntansi yang terpelihara   | 1 aplikasi | 79.821.400,00 |  |  | 1 aplikasi | 79.821.400,00 |
|  |  |  |           |  |             | Jumlah SDM Akuntansi yang mengikuti bimtek/pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan | 100 orang  |               |  |  | 100 orang  |               |



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) BPKAD Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD tahun 2021 sebagai penjabaran Renstra BPKAD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2021. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2020. Rencana Kerja sebagai pedoman bagi BPKAD di dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan, memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

#### **1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian**

Program kegiatan tahun 2021 dilaksanakan berdasar prioritas pembangunan tahun 2021 dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia.

Kaidah – kaidah Pelaksanaan

- BPKAD kota Blitar berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) BPKAD Tahun 2021 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Blitar tahun 2021;
- BPKAD Kota Blitar berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021 dengan berpedoman kepada Renja BPKAD Kota Blitar tahun 2021;
- Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaa Renja BPKAd Tahun 2021, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2021.

#### **2. Rencana Tindak Lanjut**

Rencana Kerja (Renja) selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja BPKAD. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja BPKAD Tahun 2021 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad



serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Kota Blitar tahun 2021. Rencana Kerja (Renja) BPKAD Kota Blitar ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh seluruh staf di BPKAD Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan good governance melalui perencanaan pembangunan yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Blitar, 2020

KEPALA BADAN PENDAPATAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR

**WIDODO SAPTONO J.S.Sos.,M.AB**

Pembina Utama Muda

NIP.19710224 199703 1 004

## ***Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Tahun***



## *Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Tahun*

